

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB 4, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Komunikasi strategis dilakukan oleh Kemenkumham karena diperlukannya sebuah tindakan yang cepat untuk menangani ormas HTI. Pemerintah memiliki alasan kuat terhadap putusan kebijakan ini.
2. Dalam pengeluan keputusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI, terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam proses komunikasi strategis adalah dari *top to down*. Dimulai dari lembaga negara paling tertinggi yaitu Presiden hingga ke masyarakat.
3. Konsep komunikasi strategis yang direpresentasikan Kemenkumham adalah dimulai dari melakukan koordinasi pada lembaga internal Kemenkumham maupun lembaga pemerintah lain yang terkait, kemudian dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap ormas HTI, dan Kemenkumham bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintahan terkait untuk menjalankan seperangkat tindakan yang akan diambil, hingga sampai pada hasil dari pengkajian tersebut yang melahirkan sebuah kesepakatan dan keputusan bersama yaitu tindakan putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI.
4. Humas Kemenkumham dalam hal pada kasus pada pengeluan putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI ini sudah melakukan perannya sebagai humas pemerintah dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan transparansinya pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik mengenai informasi pada kasus HTI, pemberitaan di media lebih banyak positifnya terkait kasus putusan kebijakan ini yang membuktikan humas sudah bisa mengendalikan arus informasi yang beredar, aksesibilitas yang publik dapatkan mengenai putusan kebijakan ini juga sudah sangat

baik dengan dapat diperolehnya informasi selain dari media massa saja tetapi dari website resmi Kemenkumham sehingga hal ini mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan Komunikasi Strategis pada sistem kenegaraan Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Diperlukannya penetapan dan penjelasan yang jelas mengenai konsep dari komunikasi strategis pada sistem kenegaraan Republik Indonesia.

